

Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Kecamatan Cimencyan

Bagas Wijayakusuma*

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/2/2023

Revised : 25/6/2023

Published : 17/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 29 - 38

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Banyak Daerah Resapan Air (DRA) yang mengalami alih fungsi menjadi lahan terbangun salahsatunya daerah Kecamatan Cimencyan. Melihat permasalahan terkait maka penulis berpendapat bahwa "faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan daerah resapan air kecamatan cimencyan sebagai bagian dari kawasan bandung utara (KBU)" perlu dilakukan. Tujuan penelitian yang diambil yaitu ingin mengetahui luasan kawasan resapan air dan berapa banyak lahan yang dialih fungsikan ke peruntukan lain dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena jika Kawasan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang membuat lahan resapan air di kecamatan cimencyan beralih fungsi dari peruntukan nya. Metode yang dipakai adalah mix method dengan menggunakan metode antara lain studi literatur, jurnal ilmiah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang nanti nya akan dianalisis menggunakan metode spasial dan analisis regresi liner berganda. Dari penelitian yang telah di lakukan,penulis menyimpulkan adanya alih fungsi lahan pada kawasan resapan air Kecamatan Cimencyan sebesar 31.9 Ha yang berubah peruntukan menjadi lahan terbangun. Adanya alih fungsi lahan Kawasan Resapan Air di Kecamatan Cimencyan ini juga disebabkan oleh 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan ekonomi pertumbuhan penduduk, migrasi penduduk dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Alih Fungsi; Lahan; Kawasan Resapan Air.

ABSTRACT

Many water catchment areas (DRA) have been converted into built-up areas, one of which is the Cimencyan District. Looking at the related problems, the authors argue that "Factors influencing the conversion of land functions in the Cimencyan Subdistrict Water Catchment Area as Part of the North Bandung Area (KBU)" need to be carried out. The purpose of the research was to find out the area of the water catchment area and how much land has been converted to other uses and how to solve this problem because if the area and identify what factors make water catchment land in Cimencyan sub-district change its function from its designation. The method used is the mixed method using methods including literature studies, scientific journal interviews, observations, and also documentation which will later be analyzed using spatial methods and multiple linear regression analysis. From the research that has been carried out, the authors conclude that there is land use change. in the Cimencyan District water catchment area of 31.9 Ha which changed its designation to built-up land. There are 4 influencing factors, namely economic growth, population growth, population migration and facilities, and infrastructure.

Keywords : Land Conversion; Land; Water Catchment Area.

© 2023 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Dalam proses pemanfaatan tanah untuk pembangunan, persoalan tanah tidak dapat dipisahkan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan lahan [1]. Kerusakan tanah membutuhkan penanganan cepat dengan memanfaatkan teknologi yang telah dikuasai dan pengembangan teknologi inovatif untuk mencegah kerusakan tanah dan lingkungan lainnya agar tidak terus meningkat menjadi lebih serius [2]. Pengembangan kawasan resapan air merupakan pekerjaan penting untuk menjaga siklus air agar tidak terganggu yang bisa mempengaruhi keadaan lingkungan. Kawasan Resapan Air memiliki peranan melindungi lingkungan perkotaan karena menjaga daerah tangkapan air yang berfungsi untuk stabilitas siklus hidrologi atau air [3]. Tetapi, banyak daerah resapan air yang telah beralih fungsi menjadi lahan terbangun, yang menyebabkan berkurangnya daerah tangkapan air itu sendiri, seperti di Kawasan Bandung Utara (KBU) [4]. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang mengancam kelestarian sumberdaya alam tanah yang menyerap air mutlak harus berdampingan dengan upaya konservasi, karena pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kelestarian ekologis merupakan kunci keberhasilan pembangunan kawasan [5].

Kawasan Bandung Utara (KBU) dikembangkan sebagai Kawasan berfungsi lindung dan kawasan konservasi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 181 Tahun 1982. Kawasan Bandung Utara memiliki peran strategis terhadap keberlangsungan ekologis Cekungan Bandung. Menurut Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, sedikitnya 60% dari sekira 108 juta m³ air tanah dari dataran tinggi sekitar Bandung yang masuk ke Cekungan Bandung berasal dari Kawasan Bandung Utara. Dengan demikian kawasan ini merupakan kawasan tangkapan air.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Kawasan perkotaan, menyebabkan penduduk kota memilih alternatif hidup di daerah pinggiran kota. Seperti pada Kecamatan Cimendan sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). Dengan meningkatnya penduduk di wilayah pinggiran kota berbanding lurus dengan maraknya pembangunan di daerah tersebut. Seringkali pembangunan ini tidak pandang bulu dalam artian mereka hanya membangun di lahan kosong bahkan merubah suatu fungsi lahan menjadi suatu bangunan tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Bertambahnya lahan terbangun berpotensi menambah beban terhadap lingkungan maupun daya dukung lingkungan di Kawasan tersebut [6].

Maraknya alih fungsi Kawasan Resapan Air akan berdampak negatif bagi Kecamatan Cimendan atau Kawasan Bandung Utara (KBU) secara keseluruhan. Perubahan fungsi tutupan lahan dari kawasan lindung (lahan hijau) menjadi kawasan pemukiman akan memperparah tekanan terhadap kondisi lingkungan, termasuk mempengaruhi tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi di kawasan hulu, yang menyebabkan banjir dan banjir di hilir, serta tanah longsor dan kekeringan [7]. Seperti yang telah diketahui, bahwa Kawasan Bandung Utara (KBU) ini beberapa kali sering di landa banjir bandang, terhitung pada tahun 2019 sudah ada 3 kali Banjir bandang yang terjadi dari Bandung Utara (Walhi, 2019). Dan salah satu contoh kasusnya adalah Banjir di Kecamatan Cimendan. Curah Hujan yang tinggi dan rusaknya wilayah tangkapan air karena alih fungsi lahan resapan air disinyalir menjadi penyebab terjadinya banjir di Kawasan Bandung Utara dan berdampak air meluap hingga ke permukiman warga, yang berada pada Kawasan hilir termasuk Kawasan Jatihandap dan Cicaheum.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan ruang untuk kepentingan sosial dan ekonomi, terutama untuk kepentingan pemukiman. Hal ini menyebabkan pembangunan besar-besaran di berbagai daerah [8]. Selain dipadati oleh Kawasan pemukiman, Daerah Aliran Sungai dan Sempadan daerah sekitar Sungai Cipamokolan pun sudah gundul dan jarang terlihat adanya vegetasi. Kawasan Cimendan, Kabupaten Bandung, masuk ke dalam wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang di peruntukan sebagai wilayah resapan dan tangkapan air untuk menyangga wilayah Cekungan Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana alam Banjir.

Perubahan kondisi tanah secara berkala juga meningkatkan risiko banjir. Penyebabnya antara lain kapasitas sungai berkurang karena pendangkalan, konversi lahan dan daerah penyangga alam menjadi lahan terbangun dilakukan tanpa memperhatikan perlindungan berbahaya dari daerah tangkapan air. Eksploitasi Kelebihan tanah memperdalam air tanah, sehingga air laut menembus lebih dalam ke daratan, yang mengganggu keseimbangan air. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama daerah perkotaan, karena daerah perkotaan memiliki kelerengan yang landai atau merupakan hilir dari sungai yang ada

di kota tersebut. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai macam factor penyebab seperti iklim dan faktor fisik wilayah tersebut.

Jika Kecamatan Cimenyan yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU) khususnya pada daerah resapan air ini terus di eksploitasi oleh kepentingan beberapa pihak yang tidak mementingkan keberlangsungan lingkungan hidup bukan tidak mungkin banjir akan terjadi kembali di Kawasan hulu seperti banjir pada Kawasan Cimenyan yang mengakibatkan lumpuhnya sebagian kawasan di bawahnya seperti Cicaheum dan Jatihandap. lalu akan mengenai daerah resapan air yang penting untuk di jaga pada sebuah daerah. Setiap wilayah seharusnya mengembangkan kawasan resapan air. Seharusnya Kawasan Bandung Utara (KBU) ini sendiri bersifat sebagai penyeimbang lingkungan khususnya pada daerah Bandung Raya.

Oleh karena itu di penulis menganggap perlunya mencari factor penyebab alih fungsi lahan di daerah resapan air Kecamatan Cimenyan Melihat berbagai permasalahan terkait alih fungsi lahan resapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan juga keterbatasan penelitian yang terfokus pada daerah resapan air maka penulis berpendapat bahwa “ Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Kecamatan Cimenyan Sebagai Bagian Dari Kawasan Bandung Utara (KBU)” perlu dilakukan.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan Mix Method. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Simple Random Sampling dan menggunakan rumus taro yomane dan diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang di dalamnya itu terdapat wawancara, observasi dan dokumentasi lalu data sekunder yang didalamnya terdapat data peta Peta Tematik berupa (Topografi, Curah Hujan, Kelerengan, Jenis Tanah dan Hidrologi) dan Peta Citra Satelite tahun 2016 - 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Skoring Penentuan Kawasan Resapan Air

Hasil perhitungan analisis skoring penentuan Kawasan resapan air yang merujuk pada Pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2013 Tentang Variabel, Kriteria dan Klasifikasi Penentuan Daerah Resapan Air (DRA) menunjukkan bahwa mayoritas lahan Kecamatan Cimenyan mempunyai kesesuaian “Kurang Sesuai” dengan presentase sebesar 57.96 %. Sedangkan Rentang “ Sesuai dan “ Cukup Sesuai “ mempunyai presentase sebesar 25,73 % dengan rincian presentase kelas “Sesuai” sebesar 0.20 % dan kelas “Cukup Sesuai” sebesar 25.53 %

Dapat di simpulkan bahwa Kecamatan Cimenyan mempunyai Kawasan Resapan Air sebesar 1.365,4 Ha atau sekitar 25,73 % dari total luas Kecamatan Cimenyan. Desa Mekarmanik mempunyai luasan Kawasan Resapan Air terbanyak dengan 888,8 Ha, sedangkan Desa Padasuka, Desa Cikadut dan Desa Sindanglaya sama sekali tidak mempunyai kesesuaian untuk menjadi Kawasan Resapan Air.

Tabel 1. Luas Kawasan Resapan Air Kecamatan Cimenyan

No	Desa	Luas (Ha)		Jumlah Luas (Ha)
		Sesuai	Cukup Sesuai	
1.	Cibeunying	0,0	103,4	103,4
2.	Padasuka	0,0	0,0	0,0
3.	Mandalamekar.	0,0	0,5	0,5
4.	Cikadut	0,0	0,0	0,0
5.	Sindanglaya	0,0	0,0	0,0
6.	Mekarmanik	1,1	887,6	888,8
7.	Cimenyan	4,4	146,2	150,6

Tabel 1. Luas Kawasan Resapan Air Kecamatan Cimenyan (Lanjutan)

No	Desa	Luas (Ha)		Jumlah Luas (Ha)
		Sesuai	Cukup Sesuai	
8.	Mekarsaluyu.	0,0	6,9	6,9
9.	Ciburial	4,8	210,4	215,2
Jumlah Luasan (Ha)		10,3	1.355,0	1.365,4

Sumber: Hasil Analisis,2021

Dari Hasil Peta Dibawah dapat di simpulkan bahwa wilayah bencana banjir tidak terdapat pada wilayah resapan air maka dari itu sintesa yang disimpulkan penulis adalah banjir terjadi karena tidak adanya kawasan resapan air untuk lebih lengkapnya dapat di lihat di peta berikut ini.



Gambar 1. Peta Kesesuaian Kawasan Resapan Air Kecamatan Cimenyan

Analisis Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Kecamatan Cimenyan

Kawasan Resapan Air di Kecamatan Cimenyan telah beralih fungsi menjadi lahan terbangun sebesar 211 ha dalam kurun waktu 2016 – 2021 atau teralih fungsikan sebesar 15,45 % dari total luas Kawasan Resapan Air di Kecamatan Cimenyan selua 1.365,4 Ha. Dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 kawasan resapan air beralih fungsi menjadi lahan terbangun dengan rata – rata kenaikan sebesar 42,4 Ha dan luasan terbesar alih fungsi lahan resapan air di Kecamatan Cimenyan dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah 58 Ha di tahun 2016 – 201.

Mengkaitkan dengan bencana banjir pada tahun 2019 alih fungsi di atas bisa memperparah potensi terjadinya bencana banjir di karenakan semakin berkurang nya Kawasan resapan air berakibat kepada air limpasan ke permukaan yang semakin tinggi juga.

Tabel 2. Hasil Digitasi luas alih fungsi lahan resapan air Kecamatan Cimenyan

Penggunaan Lahan	Tahun					Jumlah (Ha)
	2016- 2017	2017 -2018	2018 -2019	2019 - 2020	2020 - 2021	
Vegetasi Pohon	41,4	30,9	16,5	23	18,5	130,3
Semak Belukar	3,4	1,4	1	13,4	2,2	21,4
Pertanian	13,2	13,1	9,5	15,1	8,4	59,3
Jumlah (Ha)	58	45,4	27	51,5	29,1	211

Sumber : Hasil Digitasi,2021



Gambar 2. Peta Alih Fungsi Lahan Resapan Air 2016-2021

Analisis Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Resapan Air Kecamatan Cimayan

Tabel 3. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.263	.227		5.566	.000
Sarana Prasarana	.092	.039	.172	2.396	.019
Kebutuhan Pemukiman Penduduk	.050	.039	.103	1.263	.210
Migrasi Penduduk	.194	.044	.342	4.407	.000
Pertumbuhan Penduduk	.215	.049	.330	4.415	.000
Pertumbuhan Ekonomi	.218	.040	.390	5.438	.000
Kebijakan	.052	.038	.099	1.356	.178

Sumber: Hasil Analisis,2021

Berdasarkan Uraian dari hasil Uji T dapat di simpulkan bahwa sarana prasarana (X1), Migrasi Penduduk (X3) Pertumbuhan Penduduk internal (X4), Pertumbuhan Ekonomi (X5) memberikan pengaruh terhadap Alih Fungsi lahan Resapan air di Kecamatan Cimayan (Y), Sedangkan Variabel Kebutuhan Pemukiman Penduduk (X2) dan Kebijakan (X6) tidak berpengaruh terhadap Alih Fungsi Lahan Resapan Air di Kecamatan Cimayan.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.908	6	2.651	20.390	.000 ^b
	Residual	12.092	93	.130		
	Total	28.000	99			

Sumber: Hasil Analisis,2021

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas diketahui bahwa hasil nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 28,633 maka H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 hingga X6 secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Alih Fungsi Lahan Resapan Air di Kecamatan Cimenyan.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 ^a	.568	.540	.361

Sumber : Hasil Analisis,2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai R Square sebesar 0,568. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 56.8% dan sisanya 33.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam analisis ini.

Berdasarkan Uji T Terdapat 4 Variabel yang berpengaruh menyebabkan Alih fungsi lahan Resapan Air di Kecamatan Cimenyan adapun urutan variable yang paling berpengaruh adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Variabel Independen yang berpengaruh terhadap Variabel Dependen

No	Variabel Independen	T	Sig
1	Pertumbuhan Ekonomi	5438	0.000
2	Pertumbuhan Penduduk	4415	0.000
3	Migrasi Penduduk	4407	0.000
4	Sarana dan Prasarana	2396	0,019

Sumber : Hasil Analisis, Pribadi

Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kawasan Resapan Air Kecamatan Cimenyan

Perumusan rekomendasi atau arahan pengendalian alih fungsi lahan resapan air di Kecamatan Cimenyan didasarkan pada factor penyebab utama alih fungsi lahan resapan air yang telah terbentuk dalam analisis sebelumnya di wilayah penelitian. Perumusan Rekomendasi atau arahan pengendalian alih fungsi lahan berupa analisis triangulasi berdasarkan fakta empiri di lapangan sesuai dengan faktor penyebab alih fungsi lahan yang terbentuk, tinjauan literatur terkait arahan pengendalian alih fungsi lahan, dan tinjauan kebijakan dan peraturan daerah.

Berikut ini merupakan rumusan rekomendasi atau arahan pengendalian alih fungsi daerah resapan air di Kecamatan Cimenyan. Berdasarkan hasil analisis faktor penyebab alih fungsi lahan dengan menggunakan metoda analisis regresi Linier Berganda di menyatakan terdapat 4 Varibel yang paling berpengaruh terhadap Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Cimenyan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Migrasi Penduduk dan juga Sarana Prasarana Oleh karena itu arahan pengendalian alih.

Sedangkan untuk fakta empiri di Kecamatan Cimenyan sendiri digunakan untuk menentukan Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kawasan Resapan Air yang lebih terfokus untuk satu daerah ataupun Desa di Kecamatan Cimenyan itu sendiri. Dan juga bahan pendukung untuk arahan pengendalian berdasarkan kondisi di wilayah Kawasan Resapan Air. Tinjauan Literatur dan juga Kebijakan di gunakan untuk menentukan oput dari arahan pengendalian alih fungsi lahan Kawasan resapan air itu sendiri.

Pembatasan Pembangunan Sarana Ekonomi Pada Daerah Resapan Air Di Kecamatan Cimenyan

Dengan adanya objek wisata di Kecamatan Cimenyan berbanding lurus juga perkembangan ekonomi di wilayah objek wisata tersebut, mengigat dalam setiap objek wisata selalu adanya sarana ekonomi yang sebagian dari sarana ekonomi tersebut di punyai oleh warga kecamatan cimenyan itu sendiri, dengan banyaknya objek wisata alam membuat banyak nya investor yang tertarik membangun suatu usaha demi meraup keuntungan. Contoh unit

usaha yang ada di Kecamatan Cimencyan adalah Restoran dan juga kafe dengan daya tarik panorama ataupun *City Lights* Kota Bandung yang bisa di akses di Kecamatan Cimencyan karena letak geografis nya yang strategis untuk melihat panorama kota bandung.



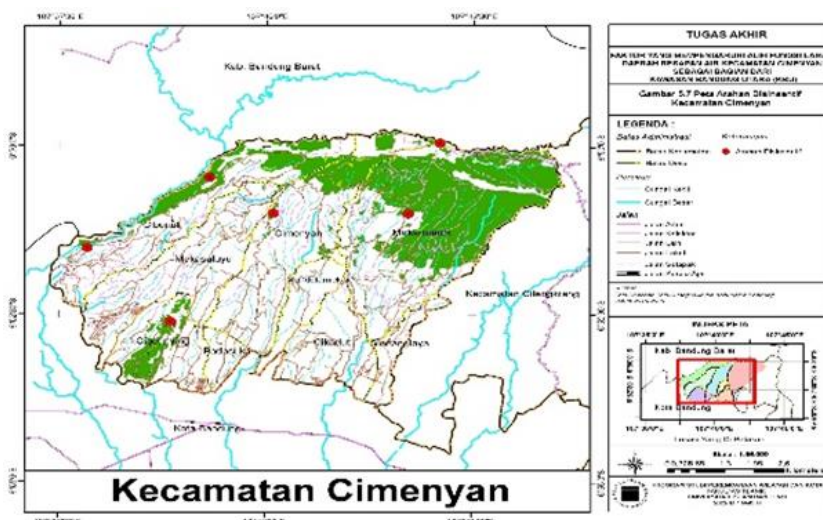
Gambar 3. Café Degrote

Dengan maraknya pembangunan sarana ekonomi yang ada di daerah objek wisata Kecamatan Cimencyan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat cimencyan itu sendiri. Akan tetapi sangat disayangkan apabila pembangunan sarana ekonomi ini membuat terganggunya keberlangsungan lingkungan hidup dalam hal ini daerah resapan air yang seharusnya di lindungi demi menjaga siklus hidrologi Kecamatan Cimencyan itu sendiri dalam hasil analisis sebelumnya pertumbuhan ekonomi disinyalir menjadi salah satu sebab kuat terjadinya alih fungsi lahan pada daerah resapan air di Kecamatan Cimencyan oleh karena itu sebaiknya pembangunan Kawasan sarana ekonomi pada daerah objek wisata Kecamatan seharusnya tidak boleh di bangun pada daerah resapan air karena akan mengganggu siklus hidrologi dari Kecamatan Cimencyan itu sendiri, walaupun pembangunan Sarana Ekonomi memiliki keuntungan bagi pendapatan warga sekitar Kecamatan Cimencyan akan tetapi jika pembangunan terus di lanjutkan maka akan berdampak pada siklus hidrologi yang bisa mengakibatkan Bencana Alam di kemudian hari. Salah satu kebijakan untuk menertibkan alih fungsi lahan adalah dengan mencegah alih fungsi daerah resapan air dan mengembalikan fungsi perlindungan daerah resapan air yang telah diubah menjadi wisata alam dan kawasan hijau [9].

Penerapan Disinsentif berupa Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana merupakan upaya untuk menghambat perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang merugikan dan tidak sesuai dengan RTRW Kawasan Bandung Utara maupun RTRW Kabupaten Bandung itu sendiri yang ada. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan dengan tujuan untuk mencegah, membatasi, dan mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan Rencana tata ruang.

Kawasan Bandung Utara dikembangkan sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 181 Tahun 1982. Kawasan Bandung Utara memiliki posisi dan peran strategis terhadap hamparan ekologis Cekungan Bandung. Menurut Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, sedikitnya 60% dari sekira 108 juta m³ air tanah dari dataran tinggi sekitar Bandung yang masuk ke Cekungan Bandung berasal dari Kawasan Bandung Utara. Dengan demikian kawasan ini merupakan kawasan tangkapan air dengan fungsi hidrologis yang dimana Kecamatan Cimencyan merupakan salah satu bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU) dalam hal ini pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di lakukan untuk mengghindari adanya cabang baru atau pusat ekonomi baru yang berdampak pada potensi alih fungsi daerah resapan air pada Kecamatan Cimencyan. Pemberian disinsentif berupa pembatasan penyediaan prasarana dan saran ini di rekomendasikan di terapkan pada wilayah yang terdapat pada Peta berikut.



Gambar 4. Peta Wilayah Penerapan Disinsentif

Pencegahan Migrasi Penduduk Yang Bisa Menyebabkan Fenomena Urban Sprawl Pada Kecamatan Cimencyan

Menurut hasil analisis faktor penyebab alih fungsi lahan resapan air di Kecamatan Cimencyan menunjukkan variabel migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan kawasan resapan air di Kecamatan Cimencyan. Fenomena migrasi penduduk di Kecamatan Cimencyan sendiri ini bisa mendorong terjadinya fenomena *urban sprawl*. *Urban sprawl* atau dikenal dengan pemekaran kota merupakan bertambah luasnya kota secara fisik. Perluasan kota disebabkan semakin berkembangnya penduduk dan semakin tingginya arus urbanisasi. Semakin bertambahnya penduduk kota menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan, perkantoran, dan fasilitas sosial ekonomi lain. *Urban sprawl* terjadi dengan ditandai adanya alih fungsi lahan yang ada di sekitar kota (urban periphery) mengingat terbatasnya lahan yang ada di pusat kota.

Urban sprawl bisa dideskripsikan sebagai pembangunan yang tidak terencana, menyebar, kepadatan rendah, dan tidak terstruktur di kawasan pinggiran [10]. Pesatnya penyebaran kota berbanding terbalik dengan kepadatan bangunan. Semakin tinggi kepadatan bangunan, semakin rendah sebaran di desa tersebut [11]. Salah satu bentuk nyata dari proses *urban sprawl* di kawasan pinggiran adalah meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang tersebar di pinggiran kota. Adanya pembangunan perumahan, otomatis membuat jaringan jalan menjadi bertambah dan muncul aktivitas ekonomi seperti komersial.

Berdasarkan pada penjelasan di atas fenomena *urban sprawl* bisa terlihat pada Kecamatan Cimencyan itu sendiri. Bisa di lihat berdasarkan hasil data alih fungsi lahan resapan air bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa adanya alih fungsi lahan dari peruntukan daerah resapan air menjadi lahan terbangun seperti sarana kegiatan ekonomi dan juga perumahan di Kecamatan Cimencyan dan juga meningkatnya jumlah pembangunan perumahan bertambahnya gedung secara vertikal maupun horizontal, penggunaan lahan terpisah dan penggunaan mobil yang tinggi. *Urban sprawl* ini merupakan salah satu fenomena penyebab berkembang penggunaan lahan di kawasan pinggiran.

Secara geografis Kecamatan Cimencyan lebih dekat ke pusat Kota Bandung dibandingkan Kecamatan Cileunyi dan Cilengkrang. Terhitung 9,1 km dari titik nol Kota Bandung ke pusat Kecamatan Cimencyan. Pembangunan properti mulai terlihat di desa dan kelurahan yang berbatasan dengan Kota Bandung. Kebutuhan akan rumah tinggal semakin tinggi dan tingginya harga lahan di Kota Bandung menarik minat masyarakat untuk tinggal di Kecamatan Cimencyan. Panorama yang indah menjadi tempat tujuan wisata alam dan menimbulkan ketertarikan investor sehingga bangunan hotel, resort, restoran, cafe dan tempat wisata mulai bermunculan.

Jika fenomena ini terus terjadi maka faktor migrasi penduduk harus di kendalikan agar tidak berdampak pada alih fungsi daerah resapan air Kecamatan Cimencyan oleh karena itu penulis merekomendasikan adanya pembatasan pembangunan pemukiman bagi penduduk non Kecamatan Cimencyan.

Salah satu alternatif yang bisa di lakukan adalah kebijakan larangan bagi penduduk (khususnya penduduk pendatang) yang tidak memiliki KTP atau pekerjaan tetap untuk tinggal di daerah Kecamatan Cimencyan.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang bisa di terapkan pemerintah lokal agar para pendatang yang memiliki alternatif untuk membangun atau memiliki tempat tinggal di Kecamatan Cimenyan karena faktor aksesibilitas, panorama dan juga harga lahan yang relative lebih murah dari Kota Bandung untuk tidak menetap di Kecamatan Cimenyan dan memperparah laju *Urban Sprawl*. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menekan kedatangan para migran dari Kota Bandung maupun daerah lain.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cimenyan mempunyai Kawasan Resapan Air sebesar 1.365,4 Ha atau sekitar 25,73 % dari total luas Kecamatan Cimenyan. dengan Desa Mekarmanik mempunyai luasan Kawasan Resapan Air terbanyak dengan 888,8 Ha, sedangkan Desa Padasuka, Desa Cikadut dan Desa Sindanglaya sama sekali tidak mempunyai kesesuaian untuk menjadi Kawasan Resapan Air.

Kawasan Resapan Air di Kecamatan Cimenyan telah beralih fungsi menjadi lahan terbangun sebesar 211 ha dalam kurun waktu 2016 – 2021 atau teralih fungsikan sebesar 15,45 % dari total luas Kawasan Resapan Air di Kecamatan Cimenyan selua 1.365,4 Ha. Dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 kawasan resapan air beralih fungsi menjadi lahan terbangun dengan rata – rata kenaikan sebesar 42,4 Ha dan luasan terbesar alih fungsi lahan resapan air di Kecamatan Cimenyan dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah 58 Ha di tahun 2016 – 2017. Alih fungsi lahan Kawasan Resapan Air di Kecamatan Cimenyan ini juga disebabkan oleh 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pertambahan Penduduk Internal, Migrasi Penduduk serta Sarana dan Prasarana.

Daftar Pustaka

- [1] D. Arthamesia, A. Silviana, and S. Adiyanta, “Alih Fungsi Tanah Resapan Air Menjadi Kawasan Pemukiman dari Presfekif Tata Guna Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang),” *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, vol. 5, no. 3, 2016, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12193>.
- [2] N. Sutrisna, S. R. P. Sitorus, and K. Subagyono, “Tingkat Kerusakan Tanah di Hulu Sub DAS Cikapundung Kawasan Bandung Utara,” no. 32, 2010.
- [3] E. E. R. Resubun, R. Ch. Tarore, and E. D. Takumansang, “Analisis Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Resapan Air di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado,” vol. 2, no. 2, 2015.
- [4] A. A. Seng, V. A. Kumurur, and Moniaga Ingerid L., “Analisis Perubahan Luas Kawasan Resapan Air Di Kota Manado,” *Sabua*, vol. 7, no. 1, pp. 423–430, 2015, doi: <https://doi.org/10.35793/sabua.v7i1.8277>.
- [5] A. S. Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*. PT Kompas Media Nusantara.
- [6] S. Idoan Siregar, “Upaya pelestarian kawasan resapan air di wilayah selatan Medan ,” Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU), 2003.
- [7] Warsilan, “Dampak Perubahan Guna Lahan Terhadap Kemampuan Resapan Air (Kasus: Kota Samarinda),” *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA*, vol. 15, no. 1, p. 70, May 2019, doi: [10.14710/pwk.v15i1.20713](https://doi.org/10.14710/pwk.v15i1.20713).
- [8] R. S. S. A. Soemadiredja and Y. Asyiwati, “Kajian Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Air Limpasan di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 36–43, Jul. 2022, doi: [10.29313/jrpwk.v2i1.757](https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.757).
- [9] N. P. Putri and H. Purwadio, “Arahan Pengendalian Alih Fungsi Daerah Resapan Air Menjadi Lahan Terbangun di Kecamatan Lembang, Bandung,” *Jurnal Teknik POMITS*, vol. 2, no. 1, 2013.
- [10] B. Setioko, “Growth of Urban in Finger Areas (Case Study: Semarang City) Sustainable Slum Upgrading in Urban Area.Informant Settlement and Affordable Housing.,” *Unit of Research and Empowerment of Housing and Human Settlements Resources, Center for Information and Regional Development*, pp. 79–88, 2009.

- [11] M. R. Pahlevi, G. Prayitno, and D. Dinanti, "TIPOLOGI FENOMENA URBAN SPRAWL DI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK," *Planning for Urban Region and Environment*, vol. 12, no. 1, 2023.